

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 6 NO. 1, JUNI 2015

ISSN: 2086-6313

**MENUJU SWASEMBADA GULA NASIONAL:
MODEL KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI GULA DAN
PENDAPATAN PETANI TEBU DI JAWA TIMUR**

Duwi Yunitasari, Dedi Budiman Hakim, Bambang Juanda, dan Rita Nurmalina

ANALISIS NILAI TUKAR PETANI KOMODITAS TANAMAN PANGAN DI SUMATERA UTARA

Muhammad Ilham Riyadh

**KETIMPANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH HASIL PEMEKARAN: STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN DAN GORONTALO**

Suhartono

KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Juli Panglima Saragih

**TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM
MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA**

Muhammad Zainul Abidin

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PENSUN SEKTOR KORPORASI

*Asep Ahmad Saefuloh, Achmad Sani Alhusain, Sahat Aditua F. Silalahi, T. Ade Surya,
dan Achmad Wirabrata*

KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN MELALUI PASAR MODAL

Dewi Wuryandani

PROSPEK PELAKSANAAN REDENOMINASI DI INDONESIA

Sony Hendra Permana

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 6 NO. 1, JUNI 2015

ISSN: 2086-6313

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v-vii
Abstrak	ix-xix
MENUJU SWASEMBADA GULA NASIONAL: MODEL KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI GULA DAN PENDAPATAN PETANI TEBU DI JAWA TIMUR <i>Duwi Yunitasari, Dedi Budiman Hakim, Bambang Juanda, dan Rita Nurmalina</i>	1-15
ANALISIS NILAI TUKAR PETANI KOMODITAS TANAMAN PANGAN DI SUMATERA UTARA <i>Muhammad Ilham Riyadh</i>	17-32
KETIMPANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI DAERAH HASIL PEMEKARAN: STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN DAN GORONTALO <i>Suhartono</i>	33-43
KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <i>Juli Panglima Saragih</i>	45-59
TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA <i>Muhammad Zainul Abidin</i>	61-76
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA Pensiun SEKTOR KORPORASI <i>Asep Ahmad Saefuloh, Achmad Sani Alhusain, Sahat Aditua F. Silalahi, T. Ade Surya, dan Achmad Wirabrata</i>	77-96
KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN MELALUI PASAR MODAL <i>Dewi Wuryandani</i>	97-108
PROSPEK PELAKSANAAN REDENOMINASI DI INDONESIA <i>Sony Hendra Permana</i>	109-122

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

KATA PENGANTAR

Pembaca yang budiman, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015 ini menyajikan delapan tulisan dari peneliti P3DI, akademisi dari Universitas Islam Sumatera Utara, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Jember, serta partisipan dari Kementerian Keuangan. Dalam edisi kali ini tulisan-tulisan yang disajikan mengangkat masalah-masalah ekonomi dan kebijakan publik yang terkait dengan sektor pertanian, pembangunan regional dan perdesaan, serta sektor keuangan dan moneter. Tulisan-tulisan tersebut berasal dari hasil kajian lapangan dan studi literatur.

Pada edisi kali ini, tulisan terkait dengan sektor pertanian terdiri dari dua tulisan. Tulisan pertama ditulis oleh Duwi Yunitasari, dkk. yang berjudul “Menuju Swasembada Gula Nasional: Model Kebijakan untuk Meningkatkan Produksi Gula dan Pendapatan Petani Tebu di Jawa Timur.” Tulisan ini membangun sebuah model simulasi produksi gula Jawa Timur selama periode tahun 2010-2025 dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan analisis dinamika sistem. Hasil simulasi menunjukkan bahwa produksi gula di Jawa Timur belum mampu memenuhi target produksi gula yang ditetapkan pemerintah. Pendapatan petani tebu mengalami peningkatan paling tinggi melalui kebijakan peningkatan rendemen. Kebijakan peningkatan areal pertanian, produktivitas, dan rendemen secara simultan dapat memenuhi target pemerintah pada tahun 2015 pada produksi gula Jawa Timur guna mendukung swasembada gula melalui skenario alternatif. Perspektif dalam kebijakan swasembada gula dan peningkatan pendapatan petani tebu dapat diterapkan, baik *on farm* maupun *off farm*, dengan beberapa kebijakan, yaitu pengembangan sarana produksi, ketersediaan dan akses sarana produksi, pengembangan kelembagaan dan integrasi pabrik gula dan petani tebu, peningkatan produktivitas dan daya saing industri gula, kebijakan proteksi gula, kebijakan promosi, dan harmonisasi data pasokan sebagai basis perumusan kebijakan swasembada gula nasional.

Tulisan kedua berjudul “Analisis Nilai Tukar Petani Komoditas Tanaman Pangan di Sumatera Utara” ditulis oleh Muhammad Ilham Riyadh. Tulisan ini merupakan hasil penelitian di 6 Kabupaten di Sumatera Utara dengan menggunakan analisis Nilai Tukar Petani, konsep subsisten, dan persamaan linier *Cobb Douglas*. Berdasarkan hasil perhitungannya diperoleh rata-rata NTP tanaman pangan Sumatera Utara sebesar 99,07 persen. Dari analisis Nilai Tukar Subsisten Pangan menunjukkan pengeluaran rumah tangga petani sebesar 376,69 persen. Pengeluaran untuk sandang merupakan pengeluaran terkecil rumah tangga sedangkan makanan merupakan pengeluaran yang terbesar. Sedangkan NTS pangan terhadap produksi menunjukkan bahwa biaya pupuk dan biaya upah tenaga kerja merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi usaha tani pangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi NTP di Sumatera Utara adalah produktivitas hasil, luas lahan, biaya tenaga kerja, harga komoditas, dan harga pupuk.

Tulisan berikutnya menjelaskan tentang pembangunan regional dan perdesaan ditulis dengan judul “Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo,” yang ditulis oleh Suhartono. Tulisan yang berasal dari hasil penelitian ini menggunakan model analisis tipologi Klassen dan ketimpangan dengan indeks entropi *Theil*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 kabupaten/kota, ternyata wilayah Banten terdapat empat daerah yang cepat-maju dan cepat-tumbuh, satu daerah maju tapi tertekan, satu daerah berkembang cepat, dan dua daerah relatif tertinggal. Sedangkan Gorontalo dari 6 kabupaten/kota terdapat dua daerah yang cepat-maju dan cepat-tumbuh, dua daerah berkembang cepat, dan dua daerah relatif tertinggal. Indeks entropi *Theil* Banten 3,96 dan Gorontalo 1,16. Sebagai daerah hasil pemekaran Banten memiliki ketimpangan paling tinggi, sedangkan Gorontalo sama dengan ketimpangan yang ada di daerah yang tidak dimekarkan terutama di luar Pulau Jawa. Salah satu penyumbang terbesar ketimpangan di Banten adanya pemusatan industri di Kota Cilegon. Sedangkan ketimpangan yang rendah di Gorontalo karena fokus pada pertanian yang merupakan sektor mayoritas masyarakat bekerja. Melalui hasil penelitiannya penulis menyarankan agar pemerintah memperhatikan faktor pemusatan ekonomi, karena faktor ini dapat menjadikan kebijakan pemekaran gagal mewujudkan pemerataan sebagai salah satu tuntutan lahirnya pemekaran.

Tulisan keempat ditulis oleh Juli Panglima Saragih dengan judul “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Tulisan ini berangkat dari fakta bahwa angka kemiskinan penduduk di DIY masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan angka secara nasional. Salah satu penyebab tingginya kemiskinan

di DIY akibat kebijakan pengentasan kemiskinan di DIY yang belum didukung anggaran yang memadai, baik anggaran pusat maupun daerah. Selanjutnya permasalahan tersebut menjadikan inti penelitiannya. Hasil penelitiannya menemukan bahwa pemerintah pusat dan DIY harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya dengan menciptakan strategi baru seperti menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan usaha bagi kelompok miskin, serta meningkatkan anggaran, baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Pemerintah DIY juga perlu melindungi masyarakat miskin dari ketidakberdayaannya dan mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Koordinasi kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan daerah yang baik akan membantu pengentasan kemiskinan di DIY di masa depan.

Tulisan kelima berjudul “Tinjauan atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa” yang ditulis oleh Muhammad Zainul Abidin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) berkaitan dengan kebijakan dana desa, khususnya selama periode tahun 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah didasarkan pada Permen Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa menunjukkan perbaikan dan dapat mendukung kebijakan dana desa. Pelaksanaan ADD dalam kaitannya dengan kebijakan dana desa bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penggunaan ADD berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah disalurkan untuk pembangunan perdesaan, pengembangan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan sehingga berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, sejumlah studi yang telah diangkat dalam kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan ADD di desa masih menemui sejumlah permasalahan. Berbagai hambatan tersebut perlu diatasi agar tujuan kebijakan dana desa, yaitu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, dapat terwujud.

Tulisan keenam ditulis oleh Asep Ahmad Saefuloh, *dkk.* dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi.” Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa Dana Pensiun sangat penting untuk menggerakkan perekonomian. Hal tersebut karena selain menjamin kesejahteraan tenaga kerja di masa pensiun, juga membantu perkembangan sektor riil melalui investasi. Perkembangan Dana Pensiun menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan cenderung menurun, karena kemampuan pendiri ataupun terdapat program pensiun lain. Karakteristik dari penyelenggaraan Dana Pensiun di daerah menunjukkan perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan di pusat; bagi perusahaan yang mapan sudah mampu mendirikan Dana Pensiun sendiri; perusahaan menjadi mitra pada DPPK; dan perusahaan belum menerapkan Dana Pensiun, tetapi hanya memfasilitasi pegawai untuk secara mandiri menjadi peserta DPLK. Hasil penelitiannya juga mengungkapkan perlu revisi terhadap UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Beberapa substansi perubahan, antara lain perlunya pengaturan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, pengaturan tersendiri ketika pendirian Dana Pensiun melibatkan mitra yang banyak sehingga beban menjadi tanggung jawab kolektif, dan untuk mencapai GPFK maka kewajiban mengikuti *fit and proper test* sebaiknya diberlakukan kepada kedua belah pihak, baik pengurus maupun pengawas. Selain itu, adanya implementasi program jaminan pensiun SJSN yang bersifat wajib maka jumlahnya harus *affordable* bagi kedua belah pihak. Ketentuan program pensiun wajib (BPJS-ketenagakerjaan) harus memperhatikan kemampuan pendiri dengan implementasi bertahap. Harmonisasi terhadap pengaturan sistem pensiun secara menyeluruh merupakan suatu keharusan agar program yang dijalankan berdampak positif bagi masyarakat.

Tulisan ketujuh berkaitan dengan pasar modal dan BUMN. Judul kajian adalah “Kebijakan Privatisasi BUMN melalui Pasar Modal,” yang ditulis oleh Dewi Wuryandani. Privatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, di mana sebaiknya dilakukan melalui pasar modal dengan *Initial Public Offering* (IPO). Keuntungan dari peluncuran IPO sifatnya adalah transparansi dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk ikut membeli saham-saham BUMN, termasuk investor asing. Tulisan ini juga mengungkap bahwa pelaksanaan privatisasi pada periode tahun 2010-2014 terhadap PT Pembangunan Perumahan, PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, PT Waskita, dan PT Semen Baturaja, masih menghadapi berbagai masalah. Namun demikian, meskipun privatisasi yang dilakukan telah mengikuti rambu-rambu berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, masih berpotensi menimbulkan inkonsistensi, baik terhadap kebijakan restrukturisasi BUMN yang direncanakan Kementerian BUMN maupun kebijakan sektoralnya.

Tulisan terakhir dari edisi kali ini ditulis oleh Sony Hendra Permana yang menulis tentang sektor moneter dengan judul tulisan, “Prospek Pelaksanaan Redenominasi di Indonesia.” Dalam tulisannya terungkap bahwa jika Denominasi Rupiah dilakukan saat ini maka menjadi denominasi ketiga terbesar di dunia setelah Zimbabwe dan Vietnam. Urgensi dilaksanakannya redenominasi di Indonesia didasari adanya inefisiensi perekonomian,

adanya kendala teknis pada operasional kegiatan usaha dan mendukung ekonomi nasional dalam memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Selanjutnya tulisan ini melihat kesiapan Indonesia dalam melakukan program redenominasi serta mengetahui pengaruh-pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa indikator makroekonomi Indonesia saat ini dinilai cukup kuat dan dapat mendukung diberlakukannya redenominasi. Lebih jauh diharapkan redenominasi dapat memberikan manfaat positif yaitu meningkatkan kredibilitas rupiah, menghemat biaya pencetakan uang, mempermudah transaksi keuangan, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun pemerintah dan Bank Indonesia juga perlu mewaspadai terjadinya risiko negatif yakni inflasi, peningkatan biaya, efek psikologi, dan perselisihan antar pelaku usaha.

Harapan kami semoga tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada mitra bestari dan redaksi pelaksana yang berperan aktif dalam mempertajam aspek keilmiahan tulisan yang masuk ke redaksi. Tidak kalah pentingnya, ucapan disampaikan kepada seluruh jajaran sekretariat dan tata usaha yang telah mendukung suksesnya penerbitan edisi kali ini.

Jakarta, 25 Juni 2015

Hormat kami,
Dewan Redaksi Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 6 NO. 1, JUNI 2015

ISSN: 2086-6313

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

Duwi Yunitasari (Fakultas Ekonomi, Universitas Jember), **Dedi Budiman Hakim** (Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB), **Bambang Juanda** (Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB), dan **Rita Nurmalina** (Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB)

MENUJU SWASEMBADA GULA NASIONAL: MODEL KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI GULA DAN PENDAPATAN PETANI TEBU DI JAWA TIMUR

JEKP, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, hal. 1-15

Abstrak

Pemerintah pusat mengharapkan Jawa Timur mendukung program swasembada gula nasional dengan menetapkan target produksi gula sebesar 1,65 juta ton. Untuk mewujudkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan (i) mengkaji pencapaian produksi gula dan pendapatan petani tebu Jawa Timur tanpa Revitalisasi Industri Gula Nasional (RIGN), (ii) mengusulkan kebijakan agar target swasembada gula nasional tercapai dan pendapatan petani tebu meningkat, dan (iii) merumuskan perspektif kebijakan ekonomi gula dalam mendukung keberhasilan swasembada gula dan peningkatan pendapatan petani tebu. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pendekatan analisis dinamika sistem. Simulasi dilakukan selama periode tahun 2010-2025. Hasil simulasi menunjukkan bahwa produksi gula Jawa Timur belum mampu memenuhi target produksi gula yang ditetapkan pemerintah. Pendapatan petani tebu mengalami peningkatan paling tinggi melalui kebijakan peningkatan rendemen. Kebijakan peningkatan areal pertanian, produktivitas, dan rendemen secara simultan dapat memenuhi target pemerintah pada tahun 2015 pada produksi gula Jawa Timur guna mendukung swasembada gula melalui skenario alternatif. Perspektif dalam kebijakan swasembada gula dan peningkatan pendapatan petani tebu dapat diterapkan, baik *on farm* maupun *off farm* dengan beberapa kebijakan, yakni pengembangan sarana produksi, ketersediaan dan akses sarana produksi, pengembangan kelembagaan dan integrasi PG dan petani tebu, peningkatan produktivitas dan daya saing industri gula, kebijakan proteksi gula, serta kebijakan promosi dan harmonisasi data pasokan sebagai basis perumusan kebijakan swasembada gula nasional.

Kata kunci: sistem dinamik, swasembada gula, kebijakan gula, petani tebu

Muhammad Ilham Riyadh (Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara)

ANALISIS NILAI TUKAR PETANI KOMODITAS TANAMAN PANGAN DI SUMATERA UTARA

JEKP, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, hal. 17-32

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) struktur biaya dan analisis usaha tani tanaman pangan, (2) struktur pengeluaran rumah tangga petani tanaman pangan, (3) dinamika Nilai Tukar Rumah Tangga Petani agregat Sumatera Utara (dan komponen penyusunannya) dan nilai tukar komoditas wilayah di enam kabupaten, (4) dekomposisi nilai tukar komoditas tanaman pangan terhadap konsumsi dan biaya produksi serta faktor penyusunannya, dan (5) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi nilai tukar petani komoditas tanaman pangan di Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Lokasi kegiatan meliputi 6 Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Simalungun, Asahan, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Karo, dan Langkat yang masing-masing kabupaten diambil satu kecamatan. Perhitungan NTP dimulai dari validasi kuesioner, entri data, koding data, dan pengolahan data. Metode analisis dengan menggunakan Nilai Tukar Penerimaan dan konsep subsisten serta persamaan linier *Cobb Douglas*. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata NTP tanaman pangan Sumatera Utara adalah sebesar 99,07 persen. Dari analisis Nilai Tukar Subsisten Pangan menunjukkan bahwa 376,69 persen dalam pengeluaran rumah tangga petani. Pengeluaran untuk sandang merupakan pengeluaran terkecil rumah tangga sedangkan makanan merupakan pengeluaran yang terbesar. Sedangkan NTS pangan terhadap produksi menunjukkan bahwa biaya pupuk dan biaya upah tenaga kerja merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi usaha tani pangan. Faktor-faktor yang memengaruhi NTP di Sumatera Utara adalah: produktivitas hasil, luas lahan, biaya tenaga kerja, harga komoditas, dan harga pupuk.

Kata kunci: Nilai Tukar Petani, tanaman pangan, kesejahteraan petani, *cobb douglas*, produktivitas

Suhartono (P3DI Setjen DPR-RI)

KETIMPANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI DAERAH HASIL PEMEKARAN: STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN DAN GORONTALO

JEKP, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, hal. 33-43

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antardaerah di daerah hasil pemekaran. Penelitian dilakukan di Provinsi Banten dan Gorontalo dengan menggunakan data sekunder tahun 2007-2011 dan data primer hasil wawancara dan FGD. Perkembangan ekonomi dianalisis dengan menggunakan tipologi Klassen, ketimpangan dengan indeks entropi *Theil*. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 8 kabupaten/kota, Banten terdapat empat daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, satu daerah maju tapi tertekan, satu daerah berkembang cepat, dan dua daerah relatif tertinggal. Sedangkan Gorontalo dari 6 kabupaten/kota terdapat dua daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, dua daerah berkembang cepat, dan dua daerah relatif tertinggal. Indeks entropi *Theil* Banten 3,96 dan Gorontalo 1,16. Sebagai daerah hasil pemekaran Banten memiliki ketimpangan paling tinggi, sedangkan Gorontalo sama dengan ketimpangan yang ada di daerah yang tidak dimekarkan terutama di luar Pulau Jawa. Salah satu penyumbang terbesar ketimpangan di Banten adanya pemusatan industri di Kota Cilegon. Sedangkan ketimpangan yang rendah di Gorontalo karena fokus pada pertanian yang merupakan sektor mayoritas masyarakat bekerja. Penelitian ini menyarankan pemerintah memperhatikan faktor pemusatan ekonomi, karena faktor ini dapat menjadikan kebijakan pemekaran gagal mewujudkan pemerataan sebagai salah satu tuntutan lahirnya pemekaran.

Kata kunci: pemekaran, pembangunan ekonomi, ketimpangan regional, tipologi Klassen, indeks entropi *Theil*

Juli Panglima Saragih (P3DI Setjen DPR-RI)

KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JEKP, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, hal. 45-59

Abstrak

Angka kemiskinan penduduk di DIY masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional. Berbagai program kebijakan pengurangan kemiskinan yang telah banyak dilakukan namun ternyata belum mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY secara signifikan. Selain itu kebijakan pengentasan kemiskinan di DIY juga belum didukung anggaran yang memadai, baik anggaran pusat maupun daerah. Tujuan penelitian ini untuk mencari alternatif solusi kebijakan ke depan dalam upaya mempercepat mengentaskan kemiskinan di DIY lebih efektif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif-analisis. Sumber data menggunakan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah pusat dan DIY harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya, dengan menciptakan strategi baru seperti, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan usaha bagi kelompok miskin, serta meningkatkan anggaran baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Pemerintah DIY juga perlu melindungi si miskin dari ketidakberdayaannya dan mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita mereka. Koordinasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah yang baik sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di DIY ke depan.

Kata kunci: kemiskinan, kebijakan pemerintah, Daerah Istimewa Yogyakarta

Muhammad Zainul Abidin (Kementerian Keuangan, Indonesia)

TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA

JEKP, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, hal. 61-76

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keuangan desa dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung kebijakan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dilaksanakan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan desa telah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selama tahun 2010–2013, pelaksanaan keuangan desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan. Kendala dalam pelaksanaan keuangan desa disebabkan, antara lain, kurangnya keberadaan dan kapasitas perangkat desa serta kemandirian keuangan. Apabila kendala tersebut dapat diatasi, maka pelaksanaan keuangan desa semakin memperkuat terwujudnya tujuan kebijakan dana desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan ADD telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan disalurkan untuk pembangunan perdesaan, pengembangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan. Namun, sejumlah studi yang telah diangkat dalam kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan ADD masih menemui sejumlah permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemerintah daerah kotamadya/kabupaten.

Kata kunci: alokasi dana desa, kebijakan dana desa, keuangan desa, pembangunan desa, pemerintah desa

Asep Ahmad Saefuloh (P3DI Setjen DPR-RI), **Achmad Sani Alhusain** (P3DI Setjen DPR-RI), **Sahat Aditua F. Silalahi** (P3DI Setjen DPR-RI), **T. Ade Surya** (P3DI Setjen DPR-RI), dan **Achmad Wirabrata** (P3DI Setjen DPR-RI)

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN SEKTOR KORPORASI

JEKP, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, hal. 77-96

Abstrak

Dana Pensiun sangat penting dalam menggerakkan perekonomian karena selain menjamin kesejahteraan tenaga kerja di masa pensiun, juga membantu perkembangan sektor riil melalui investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Pensiun sekaligus merumuskan kebijakan yang dapat diambil untuk memperbaiki pengelolaan Dana Pensiun di masa mendatang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Perkembangan Dana Pensiun menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan cenderung menurun, karena kemampuan pendiri ataupun terdapat program pensiun lain. Karakteristik dari penyelenggaraan Dana Pensiun di daerah adalah perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan di pusat; bagi perusahaan yang mapan sudah mampu mendirikan Dana Pensiun sendiri; perusahaan menjadi mitra pada DPPK; dan, perusahaan belum menerapkan Dana Pensiun, tetapi hanya memfasilitasi pegawai untuk secara mandiri menjadi peserta DPLK. Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dana Pensiun yang lebih baik, maka perlu revisi terhadap UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Beberapa substansi perubahan, antara lain perlunya pengaturan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, pengaturan tersendiri ketika pendirian Dana Pensiun melibatkan mitra yang banyak sehingga beban menjadi tanggung jawab kolektif, dan untuk mencapai GPFG maka kewajiban mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebaiknya diberlakukan kepada kedua belah pihak, baik pengurus maupun pengawas. Selain itu, adanya implementasi program jaminan pensiun SJSN yang bersifat wajib maka jumlahnya harus terjangkau bagi kedua belah pihak. Ketentuan program pensiun wajib (BPJS-ketenagakerjaan) harus memperhatikan kemampuan pendiri, dengan implementasi bertahap. Harmonisasi terhadap pengaturan sistem pensiun secara menyeluruh merupakan suatu keharusan agar program yang dijalankan berdampak positif bagi masyarakat.

Kata kunci: dana pensiun, PPMP, PPIP, DPPK, dan GPFG.

Dewi Wuryandani (P3DI Setjen DPR-RI)

KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN MELALUI PASAR MODAL

JEKP, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, hal. 97-108

Abstrak

Privatisasi sebuah perusahaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya seperti penyebarluasan kepemilikan saham Badan Usaha Milik Negara kepada masyarakat untuk mempercepat penerapan *good corporate governance* pada BUMN tersebut dan peningkatan partisipasi kontrol masyarakat. Privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN sebaiknya dilakukan melalui pasar modal dengan *Initial Public Offering* (IPO). IPO ini akan memberikan keuntungan yaitu adanya sifat transparansi dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk ikut membeli saham-saham BUMN, termasuk bagi investor asing. Walaupun telah melakukan privatisasi sejak tahun 1988, ternyata masih menyisakan beberapa masalah. Timbulnya potensi penyimpangan masalah harga hingga penerapan kebijakan yang berbeda untuk setiap sektor. Pada periode tahun 2010-2014 beberapa BUMN telah berhasil melakukan IPO yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, PT Waskita, dan PT Semen Baturaja, walaupun dalam pelaksanaannya masih timbul berbagai masalah, yang secara umum juga terjadi pada perusahaan swasta. Hanya saja masih perlu ada pembatasan dalam hal porsi kepemilikan pemerintah untuk menjaga aset negara. Privatisasi yang dilakukan sebagian besar telah mengikuti rambu-rambu berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ternyata masih berpotensi menimbulkan inkonsistensi, baik terhadap kebijakan restrukturisasi BUMN yang direncanakan Kementerian BUMN sendiri maupun dengan kebijakan sektoralnya.

Kata kunci: privatisasi, saham, IPO, BUMN

PROSPEK PELAKSANAAN REDENOMINASI DI INDONESIA

JEKP, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, hal. 109-122

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam rencana pelaksanaan redenominasi di Indonesia dan menjelaskan bagaimana kesiapan fundamental makroekonomi Indonesia dalam menghadapi program redenominasi serta dampak yang akan ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam membahas studi ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dan publikasi yang sudah ada sebelumnya. Urgensi dilaksanakannya redenominasi di Indonesia didasari adanya inefisiensi perekonomian, adanya kendala teknis pada operasional kegiatan usaha dan mendukung ekonomi nasional dalam memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Indikator makroekonomi Indonesia saat ini dinilai cukup kuat dan dapat mendukung diberlakukannya redenominasi. Redenominasi diharapkan dapat memberikan manfaat positif, baik bagi negara, pelaku usaha dan masyarakat. Bagi negara redenominasi dapat meningkatkan kredibilitas rupiah, menghemat biaya pencetakan uang, dan mempermudah transaksi pemerintah. Bagi pelaku usaha redenominasi dapat mempermudah transaksi keuangan sehingga mempercepat waktu operasional dan meminimalisir potensi kesalahan. Selain itu, akan mengurangi biaya penyesuaian perangkat keras dan lunak sistem akuntansi dan teknologi informasi. Bagi masyarakat, redenominasi dapat mempermudah dalam bertransaksi, mengurangi risiko kerusakan uang dan mendukung proses belajar dan mengajar pada pendidikan dasar. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia juga perlu mewaspadaai terjadinya risiko akibat redenominasi, yaitu inflasi, penambahan pengeluaran negara, penolakan sebagian masyarakat dan penambahan biaya produksi, efek psikologi, dan potensi perselisihan antar pelaku usaha dan konsumen.

Kata kunci: redenominasi, rupiah, mata uang, efisiensi

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 6 NO. 1, JUNE 2015

ISSN: 2086-6313

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Duwi Yunitasari (Faculty of Economics, Jember University), **Dedi Budiman Hakim** (Faculty of Economics and Management, Bogor Agricultural University), **Bambang Juanda** (Faculty of Economics and Management, Bogor Agricultural University), and **Rita Nurmalina** (Faculty of Economics and Management, Bogor Agricultural University)

**ACHIEVING NATIONAL SUGAR SELF-SUFFICIENCY:
A POLICY MODEL TO INCREASE SUGAR PRODUCTION
AND BOOST SUGAR CANE FARMER'S INCOME IN EAST JAVA**

JEKP, Vol. 6 No. 1, June 2015, pp. 1-15

Abstract

The central government fully expects East Java Province to support national program of sugar self-sufficiency by setting 1.65 million tons target on plantation of white sugar production. To address this problem, this study aims to (i) assess the possibility of rising the production of sugarcane in East Java and boost the income of sugarcane's farmer without the National Sugar Industry policy (RIGN), (ii) propose policies to achieve national self-sufficiency sugarcane target and boost farmers' income with RIGN policy, and (iii) formulate a perspective of economic policy on sugar to support the success of national self-sufficiency sugarcane target and boost farmers' income. This study uses secondary data and dynamic system approach. The simulation, which is carried out in the period of 2010-2025, reveals that sugar production in East Java has not been able to meet the target set by the central government. Farmer's income reach the highest through improvement of rendement policy. Policy to increase agricultural area, productivity and rendement in a simultaneous way can possibly reach a target set by the government in 2015 on the production of sugar in East Java to reach sugar self-sufficiency through alternative scenario. The perspective in the policy of sugar self-sufficiency to boost farmer's income can be applied on and off farm by making policies on development of production facilities; availability and access to production facilities; institutional development and PG integration and sugarcane farmers; productivity improvement and competitiveness on sugarcane industry; policies on sugar protection; promotion and harmonization of data on supply as the basis of national self-sufficiency policy formulation.

Keywords: *system dynamics, sugar self-sufficiency, sugar policy, sugarcane farmers*

Muhammad Ilham Riyadh (Faculty of Agriculture, Islam Sumatera Utara University)

ANALYSIS OF FARMERS TERM OF TRADE OF CROPS COMMODITIES IN NORTH SUMATERA

JEKP, Vol. 6 No. 1, June 2015, pp. 17-32

Abstract

The purpose of this study is to analyze (1) structure of costs and farm crops, (2) structure of household expenditures food crop farmers, (3) the dynamics of Farmer Household Exchange in North Sumatra and Regional Farmers Term of Trade (FTT) of commodities in six districts, (4) decomposition rate of food crops for consumption and the cost of production and formulation factors, and (5) what factors that affect the FTT growers of food crops in North Sumatra in order to improve farmers' welfare. The location of the study of FTT in North Sumatra included six districts comprising: Simalungun, Asahan, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Karo, and Langkat. One district represents each regency. The calculation of Farmer's Term of Trade starts from the validation of questionnaire, data entry, data coding, and data processing. The method of analysis uses FTT and subsistence concept and a linear equation Cobb Douglas. Based on the calculations, the average of North Sumatra FTT food crop amounts to 99.07 percent. The analysis of Subsistence Food Exchange shows 376.69 percent in the farmers' household expenditure. Spending on clothing is the lowest expenditure of household, while the food is the highest expenditure. At the same time, NTS-Food shows that fertilizer production and labor costs are the largest component in the cost of production of farm food. Factors that influence the FTT in North Sumatra are: productivity, land, labor costs, commodity prices, and the price of fertilizer.

Keywords: Farmer's Term of Trade, crops, farmer welfare, cobb douglas, productivity

Suhartono (P3DI Setjen DPR-RI)

THE REGIONAL DISPARITIES AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGENCIES/MANUCIPALITIES IN THE DECENTRALICED REGIONS: CASE STUDY IN BANTEN AND GORONTALO PROVINCE

JEKP, Vol. 6 No. 1, June 2015, pp. 33-43

Abstract

This research aims to analyze the regional disparities and economic development of regencies/municipalities in the decentralized regions. This research is conducted in the provinces of Banten and Gorontalo by using secondary data in the period of 2007-2011 and primary data collected through FGD and interview. The economic development is analysed by using Klassen Typology and regional disparities by using Theil Entropi index. This research shows that from 8 Banten's municipalities, there are four municipalities categorized as high growth-high income, one municipalities as low growth-high income, one regency as high growth-high income, and two regencies as low growth-low income. Meanwhile, in Gorontalo from six of its municipalities, there are two municipalities categorized as high growth-high income, two regencies as high growth-low income, and two regencies as low growth-low income. Banten has Theil index 3.96 and Gorontalo has Theil index 1.16. Banten has wider regional disparities compared to other regions outside Java. Regional disparities in Gorontalo are relatively similar with other regions outside Java. One of the factors that substantially contribute to wide disparities in Banten is the presence of centralized economy in Cilegon, which is situated in the municipality of Banten and known as the industrial area. Meanwhile, narrow disparity in Gorontalo is influenced by agriculture, a sector from which people in the area make a living. Therefore, the government should pay more attention on centralized economy, as it could be the main factor that determines the failure of a decentralization. One of the main factors that contributes to address issues related to disparities is to create a decentralization.

Keywords: decentralization, economic development, regional disparity, Klassen typology, Theil entropi index

Juli Panglima Saragih (P3DI Setjen DPR-RI)

GOVERNMENT POLICY TO REDUCE POVERTY IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

JEKP, Vol. 6 No. 1, June 2015, pp. 45-59

Abstract

Poverty rate in the Special Region of Yogyakarta (DIY) is relatively high at national scale. One of the factors contributing to such condition is inadequate budget from the central and regional government to support poverty eradication program. Such condition is the focus of this research. This is a qualitative research using descriptive-analysis method. This research uses relevant secondary data. The result of this research reveals that the central and regional governments of DIY should continuously improve the people's welfare in the region by formulating new strategies like creating job opportunity, business opportunity to low income people, and allocating more budget coming from regional and central governments. The regional government should also protect the poor by identifying and developing the potentials of local economy and productive efforts to boost the people's income. Coordination on the policy and program between the central and regional governments is particularly helpful in eradicating poverty in DIY.

Keywords: *poverty, government policy, Special Region of Yogyakarta*

Muhammad Zainul Abidin (Ministry of Finance, Indonesia)

STUDY OF IMPLEMENTATION OF VILLAGE FINANCE TO SUPPORT FUND VILLAGE POLICY

JEKP, Vol. 6 No. 1, June 2015, pp. 61-76

Abstract

The objectives of this study is to investigate the implementation of the village finance and the use of the Village Fund Allocation (ADD) in supporting the village fund policy based on Law No. 6 Year 2014. The data are collected by using secondary data through literature reviews, while the techniques of data analysis employs qualitative descriptive method. The results of study reveals that the implementation ADD has been based on the Regulation of the Minister of Internal Affairs No. 37 Year 2007. Based on the observation, in the period of 2010-2013, the implementation of village finance showed improvement in the sense of financial administration, the quality of financial reports, and the absorption of the budget on activities that have been programmed. Constraints in the implementation of village finances were caused by the lack of the availability and capacity of human resources of the village and independent revenue. If these obstacles can be overcome, the implementation of village finance will strongly support the village funds policy as stated by Law No. 6 Year 2014. The use of ADD has been implemented based on Government Regulation No. 72 Year 2005 on the village and distributed to rural development, community development and it has boosted income / improved welfare. However, a number of studies that have been undertaken in this study indicate that the use of ADD still encounters a number of problems in the stages of planning, implementation, quality of ADD report, weak village institutions and poor coordination with local governments.

Keywords: *village fund allocation, village fund policy, village development, village government, village finance*

Asep Ahmad Saefuloh (P3DI Setjen DPR-RI), **Achmad Sani Alhusain** (P3DI Setjen DPR-RI), **Sahat Aditua F. Silalahi** (P3DI Setjen DPR-RI), **T. Ade Surya** (P3DI Setjen DPR-RI), and **Achmad Wirabrata** (P3DI Setjen DPR-RI)

PENSION FUND MANAGEMENT POLICY IN CORPORATE SECTOR

JEKP, Vol. 6 No. 1, June 2015, pp. 77-96

Abstract

Pension fund has an important role in propelling economy as it not only ensures the welfare of employees after they have retired but also helps boost real sectors through investment. This study aims to identify condition and problems encountered in the management of pension funds and at the same time to formulate policies that can be made to improve the management of pension funds in the future. The research approach used in this study is qualitative descriptive study. In the dynamic of pension fund, its development has shown a relatively stagnant trend and even is showing a downward trend caused by the performance of institutions managing the fund or the emergence of pension program managed by new sponsors. Another finding is the characteristics of the management of pension fund in the regions which are inseparable from the development in the capital city; Well-established companies execute their own pension fund program by forming a partnership with the third parties specialized in managing pension funds (Employer Sponsored Pension Fund/DPPK); for companies that have not implemented pension fund program, they only facilitate their employees to register with private financial institution pension funds (DPLK). In the efforts to better improve the management of the pension fund, it is necessary to revise Law No. 11 Year 1992 on Pension Fund. Some contents that need to be amended are the need to change the pension plan based on Islamic principles; special management which is needed, for example, if a pension fund program launched involves many parties, those parties will have collective responsibility and in the context of realizing Government Pension Fund Global (GPF), the two parties, management board and supervisor, should follow Fit and Proper Test. In addition, as the implementation of National Social Security System (SJSN) is mandatory in nature, the number of the program should be affordable for the two parties. Provisions on Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) program should pay close attention to the ability of the institutions managing the fund and should be implemented in stages. Harmonization on the management of the whole pension system is a must to bring positive impact to public.

Keywords: Pension Fund, PPMP, PPIP, DPPK, and GPF.

Dewi Wuryandani (P3DI Setjen DPR-RI)

PRIVATIZATION THROUGH CAPITAL MARKET POLICY ON STATE-OWNED ENTERPRISES

JEKP, Vol. 6 No. 1, June 2015, pp. 97-108

Abstract

The privatization of a company aims at improving efficiency and productivity, such as release of shares of State-Owned Enterprises to public to accelerate the implementation of good corporate governance in State-Owned Enterprises and increased public participation control. The privatization of State-Owned enterprises should be done through capital market Initial Public Offering (IPO). Privatization through IPO will give benefit as it ensures transparency and provides equal opportunity to all parties including foreign investors to buy shares of State-Owned Enterprises. Since 1988, privatization program has still posed problems, ranging from the potential of price deviation to different policy implementation in each sector. In the period of 2010-14, although State-Owned Enterprises like PT Pembangunan Perumahan, PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, PT Waskita, and PT Semen Baturaja have successfully launched IPO, various problems, which is generally also faced by private enterprises, come up. Restrictions in terms of the proportion of the government ownership to maintain state assets are still needed. Although most privatizations have complied with Law No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises, inconsistency still occurs, i.e. inconsistency in a policy on restructurization planned by the Ministry of State-Owned Companies and its sectoral policies.

Keywords: privatization, shares, IPO, state-owned enterprises

Sony Hendra Permana (P3DI Setjen DPR-RI)

PROSPECTS OF REDENOMINATION IMPLEMENTATION IN INDONESIA

JEKP, Vol. 6 No. 1, June 2015, pp. 109-122

Abstract

Rupiah denomination is the third largest in the world after Zimbabwe and Vietnam. For some parties, this denomination poses some problems such as economic inefficiencies, increase in expense accounting, cost for application development, and the low value of the Rupiah in the international community. This paper aims to look at the readiness of Indonesia in the redenomination program and its effects on people's lives. This study uses descriptive method by utilizing secondary data and existing publications. The urgency of the implementation of redenomination in Indonesia is based on the inefficiency of economy, the technical constraints on the operational business activities and the urgency to support the national economy in entering the era of the ASEAN economic community. Indonesian macro economic indicators are considered strong and good enough to support the implementation of redenomination. On the one hand, Rupiah redenomination is expected to provide positive benefits such as improving the credibility of Rupiah, saving the cost of money-printing, simplifying financial transactions, and improving economic efficiency. On the other hand, the government and Central Bank (Bank of Indonesia) must also be vigilant about the negative impacts of redenomination such as inflation, rising costs of production, psychological effect, and disputes among business players.

Keywords: redenomination, rupiah, currency, efficiency